



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

KATA PENGANTAR



Ir. Ririn Sugihariyati

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun untuk melaporkan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Periode Triwulan I Tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami terus berupaya menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyajian Laporan Kinerja di masa mendatang.

Trenggalek, 26 April 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi



Ririn Sugihariyati

DAFTAR ISI

	Page
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Aspek Strategis	4
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II. PERENCANAAN KEGIATAN	
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	6
2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8
2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9
2.4. Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Analisis Capaian Kinerja	14
3.3. Akuntabilitas Keuangan	39
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	41
4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	42
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	42
LAMPIRAN	

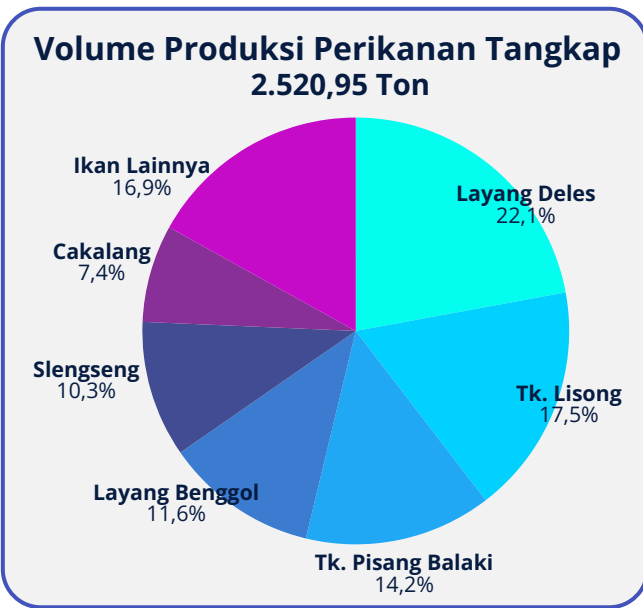
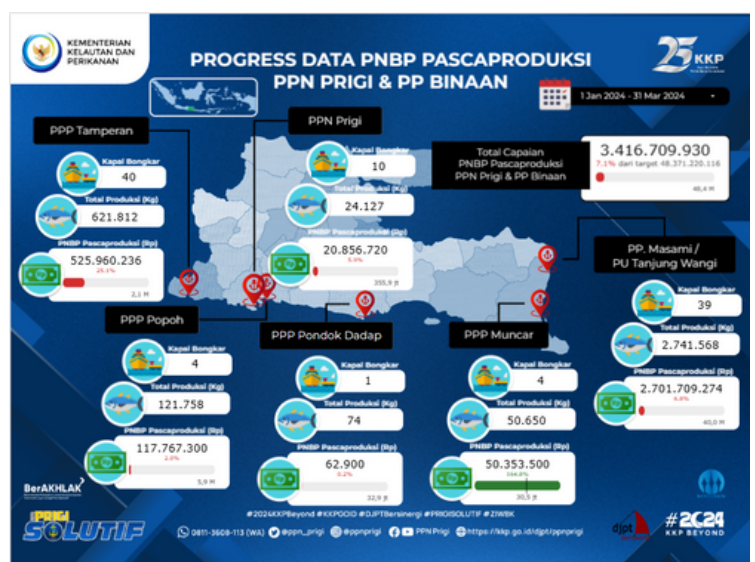
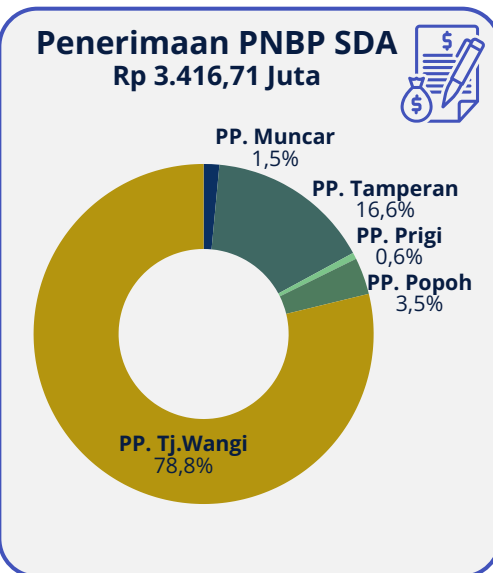
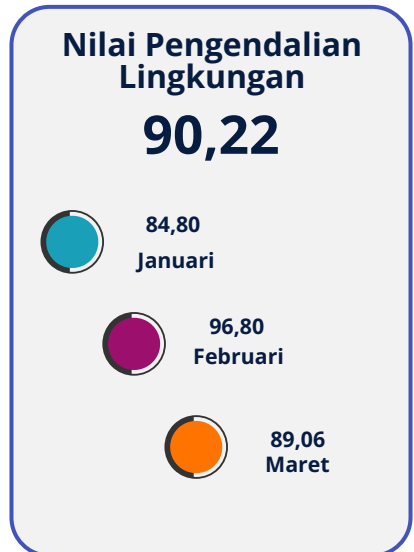
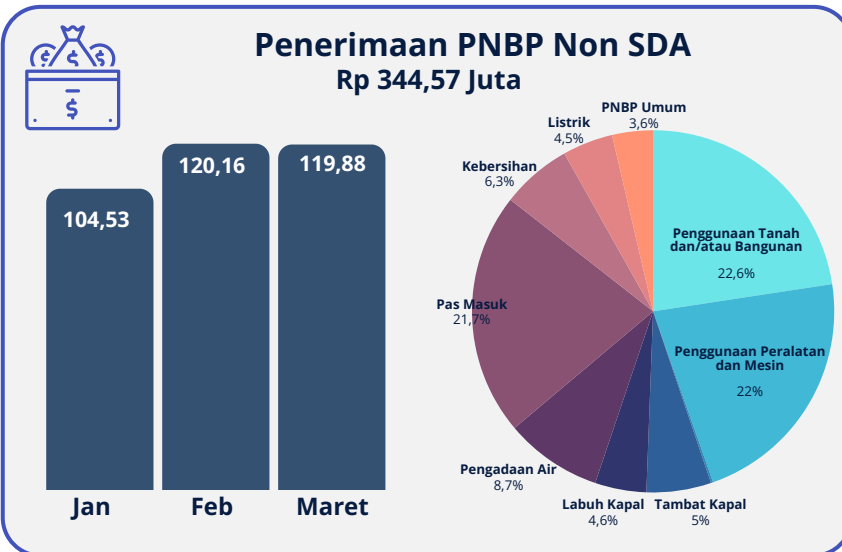
DAFTAR TABEL

	Page
Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2024	10
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan 2024	13
Tabel 3. Capaian IK “Penerimaan PNBP di PPN Prigi” Triwulan I 2024	14
Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBP Triwulan I 2024	15
Tabel 5. Capaian IK “Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi” Triwulan I 2024.....	17
Tabel 6. Capaian IK “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Triwulan I 2024 ..	20
Tabel 7. Capaian IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Triwulan I 2024	23
Tabel 8. Capaian IK “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I 2024	25
Tabel 9. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Triwulan I 2024	29
Tabel 10. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat” Triwulan I 2024	35
Tabel 11. Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Triwulan I 2024 ..	39
Tabel 12. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan I 2024	40

DAFTAR GAMBAR

	Page
Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	4
Gambar 2. Dashboard Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	12
Gambar 3. Perbandingan Capaian PNBPN PPN Prigi Tahun 2019-2024	15
Gambar 4. Perbandingan Capaian Volume Produksi Tahun 2019-2024	17
Gambar 5. Perbandingan Capaian Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2019 - 2024	20
Gambar 6. Perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2024	38

EXECUTIVE SUMMARY



PENGUSAHAAN PELABUHAN
Jumlah Proposal Baru / Perpanjangan **6**

TINGKAT KINERJA PELABUHAN
93,83

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
90,26

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.760.816.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 3.751.457.060,00 atau mencapai 25,41%. Secara kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,13% (Istimewa).

Hal ini didukung oleh pencapaian Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dimana pada triwulan I tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) IK dengan capaian $\geq 100\%$. Sedangkan pengukuran 11 (sebelas) IK lainnya bersifat Semester dan Tahun. Adapun capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan I tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2024	TW I	TW I	%
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96	309,54	344,57	111,32
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	27.321	2.193,6	2.520,95	114,92
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100			
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	93,83	111,71
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	45			
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang optimal	6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70			
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	90,22	299,73
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	377	347	360	103,75
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9 Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan (Persen)	24,5			
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80			
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	100	125

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2024	TW I	TW I	%
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	12 Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94			
		13 Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84			
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80			
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80			
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76			
		17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	86			
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30	88,3	90,26	102,22

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh tim kerja sebagai penanggung jawab IK dan Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi agar melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian periode berikutnya. Komitmen dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diharapkan dapat mendukung kinerja yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.



BAB I PENDAHULUAN

LKJ
TW I 2024



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemenuhan kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 yang pertanggungjawabannya harus dilakukan secara akuntabel dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan). Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan.
- Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan
- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang disusun setiap Tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2023 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2023 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, sebagai berikut :

- Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
- Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan; j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 64/KEPMEN-KP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan dan lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

1.4. Aspek Strategis

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang kompeten, profesional, dan berintegritas;
- Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi secara efisien dan akuntabel.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, penghargaan yang diperoleh, serta dokumen kinerja lainnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LKJ
TW I 2024

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun kedepan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut : **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

- **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
- **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
- **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
- **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;

- **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu : Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan; Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; Mengakselerasi reformasi tata Kelola dan perizinan usaha perikanan tangkap;
- **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
- **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas

Dalam mendukung peran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan visi dan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020 – 2024. Adapaun visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Pelabuhan Perikanan melaksanakan 4 (empat) misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan uraian sebagai berikut :

- **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.**

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, maka tujuan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan/permodalan bagi nelayan, penguatan ketahanan pangan, pengentasa kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan;
- Membangun struktur ekonomi perikanan tangkap yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi pada sub bidang perikanan tangkap, melalui fasilitasi pengelolaan SDI berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan;
- Mencapai lingkungan hidup sumber daya perikanan yang berkelanjutan pada bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan, menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini serta mendukung implementasi konsep *eco-infrastructure*;

- Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4,0.

2.2. Arah Kebijakan & Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menerapkan strategi dengan menetapkan Sasaran Kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Sasaran Kegiatan 1 **“Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat”** dengan Indikator Kinerja : Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 2 **“Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”**, dengan Indikator Kinerja : Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 3 **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat dan Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”**, dengan Indikator Kinerja : Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 4 **“Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”** dengan Indikator Kinerja : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;

- Sasaran Kegiatan 5 **“Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab”** dengan Indikator Kinerja : Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
- Sasaran Kegiatan 6 **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”** dengan Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan;
- Sasaran Kegiatan 7 **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan Indikator Kinerja : Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja; Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tujuan umum Perjanjian Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 4) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (*reward and punishment*). Penetapan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.4. Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian pencapaian tujuan / sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap triwulan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	27.321
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	100
		4. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	84
		5. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (orang)	45
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	6. Persentase pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7. Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai)	30,01
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8. Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	377
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan nusantara Prigi	9. Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan (persen)	24,5
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80
		11. Persentase rekonsiliasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94
		13. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84
		14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang /Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80

Lanjutan Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76
		17 Nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	86
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30

Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditentukan, terdapat beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegiatan pendukung tersebut terdapat pada dokumen Rencana Aksi sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

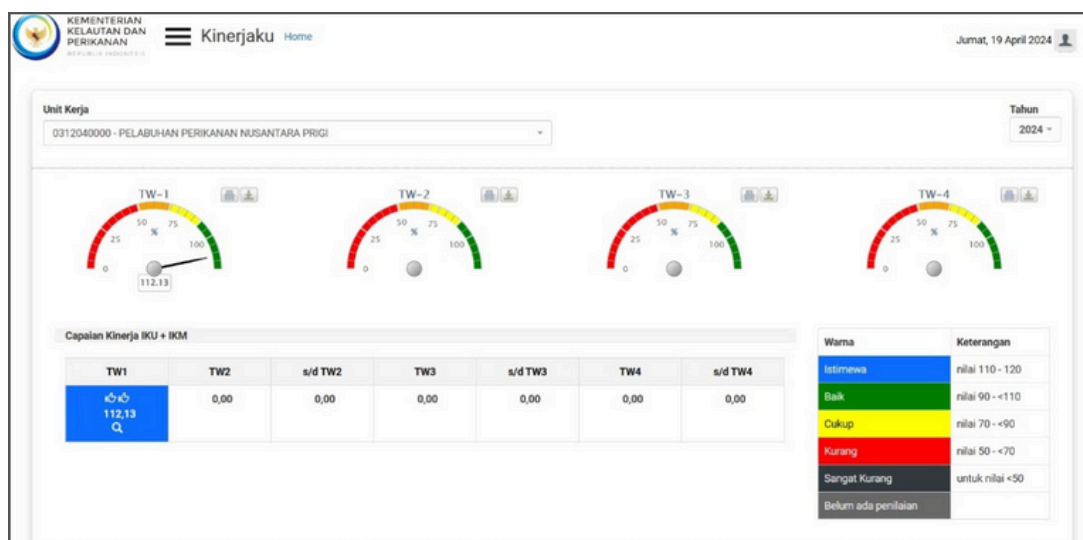
LKJ
TW I 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya, baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertahankan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menitikberatkan pada 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan I tahun 2024 memiliki kategori "**ISTIMEWA**", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **112,13%**. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada triwulan I tahun 2024, seluruh indikator kinerja atau sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan pengukuran capaian bersifat triwulan tercapai ($\geq 100\%$). Sedangkan 11 (sebelas) indikator kinerja lainnya bersifat semester dan tahun. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2023	TW I	2023	%
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96	309,54	344,57	111,32
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	27.321	2.193,6	2.520,95	114,92
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100			
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	93,83	111,71
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	45			
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang optimal	6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70			
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	90,22	299,73
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	377	347	360	103,75
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9 Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan (Persen)	24,5			
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80			
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	100	125
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94			
		13 Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84			
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80			
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80			
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76			
		17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	86			
18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30	88,3	90,26	102,22		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Periode triwulan I tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan (SK) 1 - Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan/pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara di sektor kelautan dan perikanan. PNBP PPN Prigi terdiri atas penerimaan umum dan fungsional.

Penghitungan nilai PNBP sektor perikanan tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan periode penilaian tahunan.

Tabel 3. Capaian IK “Penerimaan PNBP di PPN Prigi” Triwulan I 2024

SK 1		Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 1		Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2019- 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
TW I Tahun 2019	TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
140	184,43	143,99	339,30	421,44	309,54	344,57	111,32%	508	67,83%	

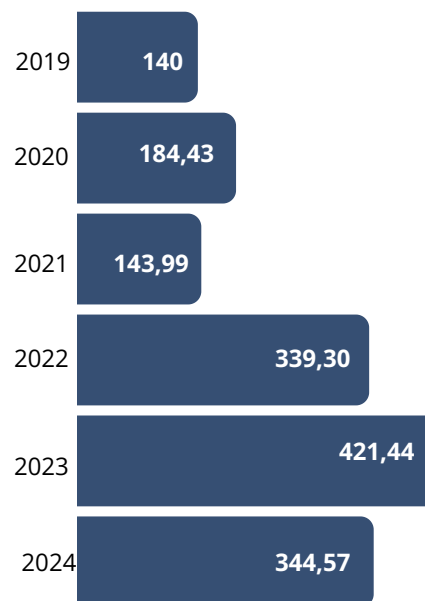
Pada triwulan I tahun 2024, capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” sebesar Rp 344,57 juta atau sebesar 111,32% dari target triwulan I tahun 2024. Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2024, dimana pada bulan Februari terdapat peningkatan PNBP pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan sebesar 139,76 % dan peningkatan PNBP penggunaan peralatan dan mesin sebesar 70,63%.

Berdasarkan jumlah penerimaan PNBP per jenis layanan, pada triwulan I tahun 2024 penerimaan PNBP terbesar yaitu pas masuk harian sekali masuk dengan persentase sebesar 19,51% dari total PNBP triwulan I tahun 2024. Penerimaan terbesar kedua yaitu pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan sebesar 17,07%. Penerimaan PNBP Non SDA dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBP Triwulan I 2024

ANGGARAN	JENIS JASA	TARGET 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
PNBP FUNGSIONAL		1.207.961.000	344.572.998
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI	562.060.000	116.423.600
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	152.121.000	58.819.500
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	409.939.000	57.354.100
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	645.901.000	181.012.278
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan	243.462.000	17.279.973
	Pelayanan Labuh untuk Kapal Perikanan	-	15.099.860
	Pelayanan Jasa Pengadaan Air/PDAM	62.958.000	31.374.230
	Pelayanan Bengkel	8.640.000	-
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian Sekali Masuk	144.154.000	67.222.000
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Berlangganan	36.270.000	13.350.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan	109.220.000	19.991.400
	Pelayanan Pelabuhan (Batang Tubuh) (Pemakaian Listrik)	41.197.000	16.694.815
PNBP UMUM			47.137.120
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	43.903.632
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	2.493.288
425911	Pendapatan Pengembalian Belanja Pegawai	-	740.200
JUMLAH PNBP FUNGSIONAL DAN UMUM		1.207.961.000	344.572.998

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2019 – 2021, peningkatan penerimaan PNBP triwulan I tahun 2024 berkisar antara 86,83% - 146,12%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, dimana pengenaan tarif PNBP menggunakan peraturan yang sama (PP 85 Tahun 2021), penerimaan PNBP triwulan I tahun 2024 mengalami peningkatan Rp 5,27 juta atau 1,55% dibandingkan capaian triwulan I tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian PNBP triwulan I tahun 2023, mengalami penurunan sebesar Rp 76,87 juta atau 18,24%. Penurunan ini disebabkan pengepul ikan sebagian besar memiliki unit *cold storage* pribadi, sehingga tidak melakukan sewa di *cold storage* di PPN Prigi.



Gambar 3. Perbandingan Capaian PNB PPN Prigi Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian PNB PPN Prigi tahun 2024 sebesar 67,83%. Sedangkan perbandingan dengan capaian penerimaan PNB PPN Palabuhanratu, capaian PNB PPN Prigi sebesar 70,88% dimana capaian PPN Palabuhanratu sebesar Rp 486,13 juta.

Faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh komitmen para petugas pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Selain itu, tercapainya penerimaan PNB PPN Prigi didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- Meningkatnya kegiatan operasional yang disebabkan karena terjadinya musim ikan yang baik, sehingga berpengaruh pada peningkatan penerimaan PNBP
- Adanya penambahan pengajuan kontrak penggunaan tanah di lahan industri PPN Prigi
- Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban pembayaran PNBP

Sedangkan faktor penghambat pencapaian IK Penerimaan PNBP PPN Prigi antara lain :

- Penggunaan jasa tanah dan/atau bangunan : Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi klausul kontrak perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan perlu ditingkatkan;
- Penggunaan *truck insulated* : Pengguna jasa banyak yang sudah mempunyai armada sendiri, serta kendaraan pemerintah yang harus menggunakan BBM non subsidi sehingga menyebabkan biaya operasional tinggi.
- Pelayanan Jasa Bengkel : Terdapat kendala pada ketersediaan SDM ahli di bidang perbengkelan

Berdasarkan faktor penghambat yang dihadapi dalam pencapaian PNBP triwulan I tahun 2024, maka upaya yang akan dilakukan yaitu melaksanakan koordinasi terkait upaya peningkatan penerimaan PNBP. Selain itu, akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan jasa tanah dan/atau bangunan dengan tujuan memberikan arahan kepada calon pengguna / pelaku usaha agar mematuhi klausul kontrak perjanjian penggunaan tanah dan / atau bangunan serta mengevaluasi kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

Dalam pencapaian target Indikator Kinerja ini, didukung anggaran sebesar Rp 168.150.000,00. Sampai dengan triwulan I, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 87.640.000,00 atau 52,12% dari total anggaran. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh 13 (tiga) belas orang SDM dengan 8 (delapan) jenis pelayanan jasa yang diberikan.

Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi SIJAKA (Sistem Jasa Kepelabuhanan) yang telah terintegrasi dengan aplikasi TEMAN SPB dan SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi kegiatan :

- Pengadaan sarana penunjang PNBP pasca produksi
- Kegiatan peningkatan pelayanan di Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung PIT
- Desiminasi pelayanan jasa sesuai dengan aturan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2024 yaitu monitoring dan evaluasi pengguna jasa, diseminasi pelayanan jasa sesuai peraturan, monitoring dan evaluasi penggunaan lahan bangunan, dan kegiatan tim terpadu dalam rangka peningkatan PNBP SDA.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 - Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Prigi Meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

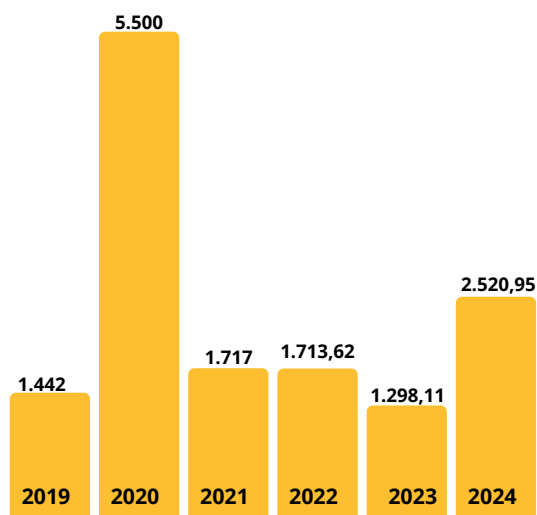
Indikator Kinerja (IK) 2 - Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Enumerator. Pendataan dilaksanakan dengan pencacahan lengkap menggunakan *form monitoring* data produksi harian. Data yang telah terkumpul kemudian diolah oleh pengolah, diverifikasi, dan divalidasi serta dilaporkan secara berkala.

Tabel 5. Capaian IK "Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi" Triwulan I 2024

SK 2	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
1.442	5.500	1.717	1.713,62	1.298,11	2.193,6	2.520,95	114,92%	23.638	10,66%	

Capaian Indikator Kinerja "Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi" (IK 2) pada triwulan I 2024 yaitu sebesar 2.520,95 Ton atau 114,92% dari target triwulan I 2024. Volume produksi per bulan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 4. Perbandingan Volume Produksi Triwulan I 2019-2024

Pada triwulan I 2024 belum memasuki musim puncak penangkapan ikan, sehingga hasil tangkapan masih cenderung rendah. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan target triwulan I 2024, capaian volume produksi perikanan tangkap telah melampaui target.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian triwulan I 2024 cenderung meningkat, dengan persentase peningkatan berkisar antara 28,01% - 68,98%. Namun, jika dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020, capaian triwulan I 2024 mengalami penurunan sebesar 2.979,05 atau 60,12%. Hal ini sebanding dengan penurunan frekuensi kunjungan kapal sebanyak 1.025 kali atau 25,32%.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian volume produksi triwulan I 2024 sebesar 10,66%. Persentase capaian ini masih cukup rendah, mengingat pada triwulan I belum memasuki puncak musim penangkapan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 70,6% lebih rendah 1.049,87 ton. Hal ini sebanding dengan frekuensi kunjungan kapal di PPN Prigi yang lebih sedikit dibandingkan dengan PPN Palabuhanratu.

Peningkatan volume produksi perikanan tangkap triwulan I tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- Peningkatan frekuensi kunjungan kapal sebanyak 909 kali atau 43 % dan peningkatan *sucessed trip* sebanyak 14,9%.
- Peningkatan produksi ikan dominan yang signifikan, yaitu Slengseng (*Scomber australicus*) 1.259,71 ton dan Layang Deles (*Decapterus macrosoma*) sebanyak 557,26 ton.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pendataan volume produksi perikanan tangkap yaitu :

- Pendaratan ikan di PPN Prigi berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam dan proses pendaratan tidak hanya fokus pada satu TPI saja dengan jumlah enumerator terbatas;
- Terdapat sistem "esekan" yang menyebabkan kemungkinan terjadinya data *loosing*.

Berdasarkan faktor penghambat yang dihadapi, upaya yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait sistem pendataan produksi perikanan tangkap serta validasi data hasil tangkapan ikan di PPN Prigi.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 10.000.000,00. Sampai dengan triwulan I, belum ada realisasi penyerapan anggaran. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran.

Dalam pencapaian IK 2, didukung oleh 14 (empat belas) orang SDM yang terdiri dari 9 (sembilan) orang enumerator, 3 (tiga) orang pengolah data, dan 2 (dua) orang validator. Penggunaan excel terformat yang terintegrasi dengan *dashboard* Operasional Pelabuhan PPN Prigi mendukung efisiensi SDM dalam pengolahan data produksi perikanan tangkap.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 2 yaitu program layanan data dan informasi dengan kegiatan penyelenggaraan, pengolahan, dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain validasi data internal terkait kesesuaian hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, serta pengolahan dan validasi data statistik perikanan tangkap.

Sasaran Kegiatan (SK) 3 - Pengelolaan PPN Prigi yang Berdaya Saing

Indikator Kinerja (IK) pada SK 3 yaitu Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 3 - Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Prigi

Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dihitung berdasarkan jumlah usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan perusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengukuran capaian indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dilakukan pengukuran dan membandingkan capaian pada triwulan I 2024.

Pada triwulan I tahun 2024, jumlah usulan perusahaan yang masuk dan telah dievaluasi dan/atau dianalisa sebanyak 6 (enam) usulan atau 100%.

Faktor pendukung pencapaian target persentase permohonan yang dianalisa/dievaluasi yaitu terpenuhinya kelengkapan dan kesesuaian berkas yang disampaikan oleh pemohon.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu banyaknya pemenuhan berkas permohonan yang perlu diserahkan oleh calon pengguna, sehingga memerlukan proses dan waktu yang lebih lama untuk bisa dianalisa/dievaluasi (usulan perusahaan baru) dan kepatuhan terhadap kontrak perjanjian kerja sebelumnya (usulan perusahaan perpanjangan).

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada calon pengguna; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pengguna jasa (pengguna tanah/bangunan).

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan antara lain pemaparan calon pengguna tanah di kawasan PPN Prigi; Monitoring dan evaluasi pemanfaatan penggunaan lahan; Monitoring dan evaluasi penggunaan tanah dan bangunan di kawasan PPN Prigi; serta Penandatanganan kontrak penggunaan bangunan di PPN Prigi.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Pencapaian IK 3 didukung oleh anggaran sebesar Rp 85.240.000,00 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 7.644.800,00 atau 8,97%. Dalam pencapaian IK 3, didukung oleh 3 (tiga) orang SDM yang terdiri dari 1 (satu) orang P3T dan 2 (dua) orang Pengelola Pengadministrasi Sarana dan Prasarana. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi perusahaan (penggunaan tanah dan bangunan), menggunakan aplikasi SIPAUS (Aplikasi perusahaan) yang berfungsi sebagai digitalisasi arsip terkait penggunaan tanah bangunan, sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian data penggunaan tanah dan bangunan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 3 yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan dengan kegiatan pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan; rapat monev pengguna jasa, lahan, dan bangunan; serta program fasilitasi dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha bagi nelayan.

Indikator Kinerja (IK) 4 - Tingkat Kinerja PPN Prigi

Tingkat kinerja pelabuhan perikanan merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan sesuai SK Ditjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan.

Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) Administrasi dan sistem informasi; 2) Fasilitas pelabuhan perikanan; 3) Pelayanan umum; serta 4) Investasi dan industri.

Tabel 6. Capaian IK "Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2024

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing									
IK 4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
-	80,58	87,75	93,00	91,67	84	93,83	111,71%	84	111,71%	

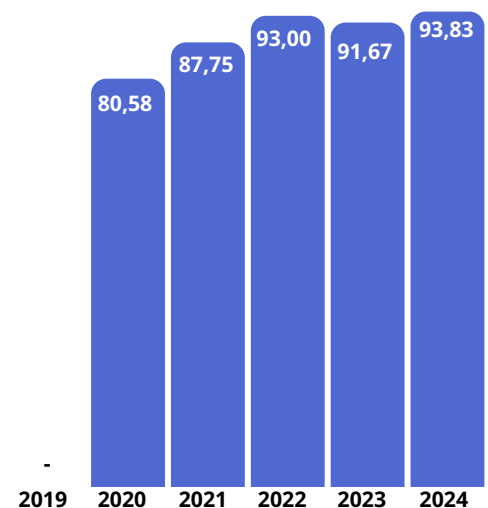
Rata-rata nilai tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan I 2024 yaitu 93,83 atau 111,71%. Pada triwulan I 2024 (bulan Januari-Maret) memiliki kategori "Sangat Baik". Nilai tingkat kinerja paling tinggi pada bulan Januari yaitu 94. Sedangkan bulan Februari dan Maret nilai tingkat kinerja 93,75. Hal ini sangat berkaitan dengan volume produksi yang didaratkan. Pada triwulan I 2024, volume produksi paling banyak di bulan Januari.

Jika dibandingkan dengan capaian 5 (lima) tahun sebelumnya, capaian triwulan I 2024 merupakan capaian tertinggi. Peningkatan nilai tingkat kinerja antara 0,83 - 13,25 atau 0,89 - 16,44%.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian IK 4 sebesar 111,71%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain - PPN Palabuhanratu (86,08), capaian PPN Prigi 109%.

Faktor pendukung pencapaian target tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu :

- Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok kerja yang melakukan tugasnya serta melaporkan dan menginput pelaksanaan kegiatan pada sistem PIPP;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi dan supervisi secara berkala terhadap input data yang telah dilaksanakan;
- Adanya tindak lanjut monitoring evaluasi dan supervisi pelaksanaan input data PIPP.



Gambar 5. Perbandingan Nilai Tingkat Kinerja Triwulan I 2019-2024

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu tingkat ketelitian operator dalam penginputan data perlu ditingkatkan (*human error*), nilai tingkat kinerja bersifat fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh 27 (dua puluh tujuh) parameter penilaian, keterbatasan anggaran dalam rangka *maintenance* sarana prasarana, jaringan internet kurang cepat, dan aplikasi *error* yang menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu menyusun jadwal pelaksanaan input data sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta validasi terdapat input data yang telah dilaksanakan.

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2024 antara lain pelaksanaan operasional PIPP di pelabuhan perikanan, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta validasi terhadap pelaksanaan input data. Selain itu, PPN Prigi juga melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi penerapan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan di pelabuhan perikanan UPT daerah yang menjadi pelabuhan binaan PPN Prigi. Adapun tujuan kegiatan tersebut yaitu meningkatkan penerapan sistem informasi dan keterpaduan pelabuhan perikanan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator PIPP dalam pelaksanaan input data PIPP sehingga dapat meningkatkan tingkat kinerja pelabuhan perikanan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 4 didukung oleh anggaran sebesar Rp 148.609.000,00 dan sampai dengan akhir triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 16.342.840,00 atau 11%. Dalam pencapaian IK 4, didukung oleh 12 (dua belas) orang operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Penggunaan *dashboard* Operasional Pelabuhan PPN Prigi mendukung efisiensi waktu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *entry* PIPP.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan yaitu : Program prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan, melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dan PP Binaan; Bimbingan teknis operator PIPP, dll.

Indikator Kinerja (IK) 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Prigi

Tingkat pelayanan kesyahbandaran merupakan indikator yang menunjukkan pelayanan kesyahbandaran yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu :

- Jumlah persetujuan yang diterbitkan (bobot 40%)
Dihitung berdasarkan jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayarnya dibagi dengan jumlah kapal aktif
- Jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
Dihitung berdasarkan kapal yang diterbitkan STBLK dibandingkan jumlah kapal aktif
- Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula penghitungan = $(100 - (\text{jumlah permintaan verifikasi SHTI yang diterbitkan} : \text{jumlah SHTI yang diterbitkan}) \times 100\%$.

Indikator Kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian dan belum dapat membandingkan dengan target tahunan, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain.

Pencapaian IK 5 didukung oleh anggaran sebesar Rp 416.069.000,00 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 55.256.503,00 atau 13,28%. Dalam pencapaian IK 5, didukung oleh 12 (dua belas) orang SDM, yang terdiri dari 1 (satu) orang Syahbandar, 8 (delapan) orang petugas penerbitan SPB dan STBL, serta 3 (tiga) orang petugas penerbitan SHTI. Dalam pelaksanaan penerbitan SHTI, PPN Prigi memiliki inovasi "KIRIM SHTI" untuk peningkatan efektifitas waktu, biaya, dan tenaga dalam pengajuan SHTI, dimana pengguna jasa tidak perlu datang ke PPN Prigi. Permohonan penerbitan SHTI dikirimkan melalui email dan produk SHTI dikirim melalui jasa pengiriman dengan biaya pengiriman dibayar pemohon (COD).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : Program pengelolaan pelabuhan perikanan, melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, desiminasi regulasi kesyahbandaran dan aplikasi teman SPB di Pelabuhan Perikanan, pengelolaan dan operasional SHTI, desiminasi SHTI penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan, dll.

Sasaran Kegiatan (SK) 4 - Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Prigi yang Optimal

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 yaitu Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 6 - Persentase Pengendalian Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Prigi" dihitung berdasarkan persentase pengembangan fasilitas dibandingkan dengan masterplan/ draft perubahan masterplan.

Indikator Kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian dan belum dapat membandingkan dengan target tahunan, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain.

Pencapaian IK 6 didukung oleh anggaran sebesar Rp 600.748.000,00 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 39.965.550,00 atau 6,65%. Dalam pencapaian IK 5, didukung oleh 4 (orang belas) orang SDM, yang terdiri dari 3 (tiga orang) Pengadministrasi Sarana dan 1 (satu) orang AP3T.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : Program prasarana bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan melalui kegiatan pelaksanaan pembangunan / pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PP Printis untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.

Indikator Kinerja (IK) 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diperbarui berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore pelabuhan. Indikator hasil meliputi kebersihan pelabuhan, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Tabel 7. Capaian IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Triwulan I 2024

SK 4 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal									
IK 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	0.4	30,10	90,22	299,73%	-	-

Capaian IK 7 triwulan I 2024 sebesar 90,22 atau 299,73% dari target triwulan I 2024. Capaian nilai pengendalian lingkungan PPN Prigi memiliki predikat “Sangat Baik”, hal ini disebabkan seluruh indikator program *mandatory* dan program *voluntary* tata kelola pengendalian lingkungan terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian triwulan I 2024 meningkat cukup signifikan. Hal ini disebabkan, pada triwulan I 2023, pengelolaan SELARASKAN belum dilaksanakan dengan optimal. Nilai Pengendalian Lingkungan merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019-2022 dan target Renstra. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 99,53% dimana nilai SELARASKAN PPN Palabuhanratu sebesar 90,65.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan di triwulan I antara lain :

- Revitalisasi Tim Pengendalian Lingkungan PPN Prigi
- Peningkatan pemahaman terhadap pemenuhan data dukung semakin meningkat sehingga capaian nilai pengendalian lingkungan semakin meningkat.

Sedangkan faktor penghambat/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian IK ini yaitu pemenuhan data dukung di setiap program yang tidak lengkap dapat menyebabkan penurunan penilaian dari pusat, diantaranya kurang lengkapnya pelaksanaan uji kualitas udara/air/sedimen dikarenakan alat uji yang dimiliki belum lengkap.

Berdasarkan faktor penghambat/ kendala yang dihadapi, upaya yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya yaitu :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan
- Pengadaan alat uji lingkungan
- Pelaksanaan sosialisasi lingkungan

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2024 yaitu pelaksanaan kegiatan K5, pemantauan pengelolaan lingkungan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi tim pengendalian lingkungan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 7 didukung oleh anggaran sebesar Rp 205.031.000,00 sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 27.580.200,00 atau 13,45%. Selain itu, pencapaian IK 7 didukung oleh 8 (delapan) orang SDM berdasarkan Surat Tugas Tim Pengelola Aplikasi Selaraskan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan di triwulan I. Efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan yaitu : Program pelabuhan perikanan - pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan melalui kegiatan K5 di pelabuhan perikanan, gerakan cinta laut dalam rangka mendukung pengendalian lingkungan, pemantauan pengelolaan lingkungan, dan *surveillance* ISO 14001.

Sasaran Kegiatan (SK) 5 - Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 5 yaitu Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Tabel 8. Capaian IK “Kapal Perikan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I 2024

SK 5 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Prigi									
IK 8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	132	347	360	103,75%	-	-

Capaian IK 8 triwulan I tahun 2024 sebanyak 360 dokumen dari target 347 dokumen atau 103,75% dari target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I 2024 merupakan akumulasi dari capaian tahun 2023 dan capaian triwulan I 2024.

PPN Prigi melayani penerbitan SKPP di pelabuhan binaan (UPT PPP Tamperan, UPT PPP Popoh, IPPP Tambakrejo, UPT PPP Pondokdadap, UPT PPP Muncar, dan Pelabuhan Masami/ Tanjungwangi). Penerbitan SKPP pada tahun 2023 dilakukan melalui mekanisme Reguler dan SE (Surat Edaran). Penerbitan SKPP pada tahun 2023 melalui mekanisme Reguler sebanyak 29,67% atau 100 (seratus) dokumen dan mekanisme SE sebanyak 70,33% atau 237 (dua ratus tujuh) dokumen. Sedangkan pada triwulan I 2024, melalui mekanisme reguler sebanyak 23 (dua puluh tiga) dokumen.

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya, capaian triwulan I 2024 sebesar 17,42%. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme penerbitan SKPP yang pada tahun 2023 mekanisme surat edaran dan reguler, Sedangkan pada tahun 2024, hanya menggunakan mekanisme reguler.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 642,86%, dimana capaian IK 8 PPN Palabuhanratu 56 (lima puluh enam) dokumen. Akan tetapi, perbandingan dengan target akhir Renstra tidak dapat dilakukan.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya penambahan SDM petugas pemeriksa kelaikan kapal dimana beberapa merupakan PNS BKO, diharapkan bisa mempercepat proses pemeriksaan kelaikan kapal perikanan.

Sedangkan faktor penghambat / kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kurangnya kesadaran pemilik kapal dalam melengkapi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan, sehingga menghambat proses pemeriksaan dan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu melaksanakan pembinaan / sosialisasi secara perorangan kepada pemilik kapal dengan tujuan mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman pemilik kapal terkait komponen kelaikan kapal perikanan.

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan yaitu penambahan petugas kelaikan kapal sebanyak 3 (tiga) orang serta melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelaikan kapal, melaksanakan sosialisasi secara perorangan kelaikan kapal perikanan kepada pemilik kapal perikanan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 25.000.000 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 8.334.000 atau 33,34%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun anggaran. Dalam pencapaian IK 8, didukung oleh 9 (sembilan) orang SDM yang terdiri atas 7 (tujuh) orang petugas kelaikan kapal, 1 (satu) orang verifikator, dan Kepala Pelabuhan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan dengan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan/ pengukuran kapal perikanan.

Sasaran Kegiatan (SK) 6 - Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 6 yaitu Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 9 - Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan

Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi laik laut, laik tangkap, dan laik simpan, serta memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

Penghitungan IK 9 yaitu persentase jumlah awak kapal / nelayan yang memiliki e-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi dibandingkan dengan jumlah awak kapal yang memiliki e-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi.

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja dan belum dapat membandingkan capaian dengan capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya sosialisasi dan fasilitasi Perjanjian Kerja Lat (PKL) serta adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya pemberian jaminan keselamatan kerja bagi nelayan.

Faktor penghambat / kendala pencapaian indikator kinerja ini yaitu awak kapal perikanan belum memiliki sertifikasi awak kapal sesuai jabatan, belum terlaksananya Perjanjian Kerja Laut (PKL) pada seluruh awak kapal, awak kapal tidak memiliki kartu tanda pengenal (KTP), Nomor Induk Kependudukan tidak valid, batas usia kepemilikan jaminan sosial Asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan, serta kurangnya kesadaran awak kapal untuk memiliki PKL dan SKN, serta adanya keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan SKN.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala pencapaian indikator kinerja ini antara lain melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Awak Kapal Perikanan / Nelayan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN).

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2024 yaitu 1) Sosialisasi dan fasilitasi Perjanjian Kerja Lat (PKL); 2) adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya pemberian jaminan keselamatan kerja bagi nelayan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 13.000.000. Sampai dengan triwulan I 2024, belum ada serapan anggaran. Dalam pencapaian IK 9, didukung oleh 7 (tujuh) orang SDM yang terdiri dari 1 (orang) orang syahbandar, 3 (tiga) orang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan 3 (tiga) orang petugas kesyahbandaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Kapal Perikanan yaitu : yaitu program fasilitasi dan pembinaan masyarakat - nelayan / awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan / kompetensinya di bidang sarana penanganan ikan melalui kegiatan Sertifikasi Kecakapan Nelayan.

Sasaran Kegiatan (SK) 7 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 7 yaitu :

- Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) 10 - Nilai PM Pembangunan ZI PPN Prigi

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan I 2024 belum dilakukan penilaian pembangunan ZI. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja ini yaitu :

- Ketertiban anggota dalam menyusun dokumen kelengkapan pembangunan ZI
- Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin
- Adanya pendampingan oleh Inspektorat V KKP dalam pembangunan ZI

Sedangkan kendala/ faktor penghambat dalam pencapaian IK Nilai PM Pembangunan ZI PPN Prigi yaitu belum adanya standarisasi di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana kerja pembangunan ZI WBK yang mengacu pada hasil penilaian Menpan RB pada periode sebelumnya.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat JV dan Satker lain terkait dokumen rencana kerja, melengkapi dokumen pembangunan ZI WBK, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen WBK.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu mengikuti kegiatan rapat persiapan penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat V pada bulan Februari.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 25.000.000. Sampai dengan triwulan I 2024, belum ada serapan anggaran. Dalam pencapaian IK 10, didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang SDM berdasarkan Surat Tugas B.45/PPN.PRG/KP.440/I/2024 tentang Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Lingkup PPN Prigi Tahun 2024. Dokumen ZI WBK dikumpulkan melalui *google drive*, sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen serta memudahkan koordinasi tim.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : yaitu program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP melalui kegiatan Pemantauan dan Pembangunan Zona Integritas.

Indikator Kinerja (IK) 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Prigi

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reviu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2023 s.d. triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Tabel 9. Capaian IK "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi										
IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)										
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	100	80	100	125%	-	-	

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan I 2024 yaitu 100% atau 125% dari target yang ditentukan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian triwulan I 2024 memiliki nilai yang sama. Sedangkan perbandingan dengan target Renstra tidak dapat dilakukan.

Faktor pendukung terlaksananya kegiatan ini yaitu adanya tindak lanjut temuan dan/atau saran pada Laporan Hasil Pengawasan dilaksanakan tepat waktu.

Sedangkan untuk faktor penghambat pencapaian, secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

Upaya yang telah dan akan dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi terus menerus kepada Inspektorat Jenderal KKP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 11 didukung oleh anggaran sebesar Rp 21.000.000 dan sampai dengan triwulan I 2024, belum ada serapan anggaran. Kegiatan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara *online* dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan manajemen kinerja internal melalui kegiatan :

- Penyusunan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan)
- Penyusunan manajemen resiko dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
- Penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut LHA (Laporan Hasil Evaluasi)

Indikator Kinerja (IK) 11 - Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Prigi

Rekonsiliasi kinerja merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (20%).

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan I 2024 belum dilakukan penilaian Rekonsiliasi Kinerja. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Resntra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja ini ditentukan oleh kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui E-SAKIP yang terintegrasi, dan kualitas monev kinerja serta pemanfaatan hasil monev kinerja sebagai umpan balik perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja. Secara umum, tidak ada kendala dalam penemuan target indikator kinerja ini.

Upaya yang telah dan akan dilaksanakan yaitu meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja dalam pengelolaan kinerja dan penganggaran sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*, peningkatan kualitas monev Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan memanfaatkan secara optimal hasil monev untuk umpan balik perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 55.000.000,00 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 3.489.000 atau 6,34%. Berdasarkan Surat Tugas No.196/PPN.PRG/KP.440/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Tim Pengelola Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, SDM yang menangani pengelolaan kinerja sebanyak 10 (sepuluh) orang. Untuk memudahkan kegiatan pengumpulan dan pengukuran dan pelaporan kinerja, pengumpulan data capaian dan analisisnya dilakukan menggunakan *google spreadsheet*. Sedangkan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive*, sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan manajemen kinerja internal melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 13 - Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018).

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018).

Terdapat penyesuaian / perubahan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 15 September 2023 tentang pengukuran IP-ASN. Perubahan formula perhitungan sebagai berikut :

- Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.
- Diklat 20JP dihitung secara proposional
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN PPN Prigi bersifat semester. Sampai dengan triwulan I 2024, capaian IP ASN sebesar 70,26 atau 87,83% dari target semester I dan 83,64% dari target tahun 2024. Sedangkan perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain :

- Adanya program pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi emilea, sehingga pegawai masih memiliki kesempatan dalam meningkatkan kompetensinya.
- Adanya perencanaan PPN Prigi berkolaborasi dengan Balai Diklat Aparatur Sukamandi dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi khususnya terkait Pelayanan Prima dan *core value* ASN Ber-AKHLAK pada tahun 2024.

Faktor penghambat/ kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu perubahan gaya pembelajaran yang dilaksanakan oleh KKP melalui BDA Sukamandi dengan media pembelajaran emilea yang menuntut pegawai untuk dapat beradaptasi dengan teknologi membuat sebagian besar pegawai PPN Prigi yang berusia 40 tahun ke atas cukup kesulitan sehingga memerlukan bantuan dan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Selain itu, tingkat kesadaran pegawai tentang pentingnya IP ASN perlu ditingkatkan.

Upaya yang akan dilaksanakan antara lain :

- Menyusun program pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan jabatan pegawai;
- Bekerja sama dengan BDA Sukamandi untuk dapat memberikan pelatihan yang dapat diikuti seluruh pegawai berbasis pembelajaran dewasa agar lebih menarik dan mudah dipahami ;
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peningkatan kompetensi pegawai.

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2024 antara lain :

- Monitoring dan evaluasi capaian IP ASN per individu
- Analisa kebutuhan pelatihan untuk para pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsinya
- Penugasan / penunjukan langsung untuk mengikuti kegiatan pelatihan
- Memberikan arahan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya IP ASN dan memberikan informasi terkait kegiatan pelatihan yang tersedia.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 13 didukung oleh anggaran sebesar Rp 8.074.778.000 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 2.250.471.147 atau 27,87% dengan nilai. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 53 (lima puluh tiga) orang ASN. Selain itu, didukung oleh 2 (dua) orang Analis Kepegawaian yang bertugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, monitoring dan evaluasi, input data capaian pengembangan kompetensi pada aplikasi e-pegawai.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan perkantoran dan layanan manajemen SDM internal, meliputi kegiatan : pembayaran gaji dan tunjangan; pembinaan dan pengembangan SDM, penguatan integritas dan substansi teknis bagi PNS Pengangkatan Tahun 2023, dan peningkatan kompetensi pegawai.

Indikator Kinerja (IK) 14 - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Prigi

Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Rencana umum pengadaan telah diupload dapal aplikasi SIRUP (20%)
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan I 2024 belum dilakukan penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Resntra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung tercapainya IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan; KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk seluruh paket pengadaan telah tersedia sesuai jadwal. Sedangkan faktor penghambat / kendala pencapaian indikator kinerja ini adalah pengendalian pelaksanaan PB/J yang masih belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang akan dilaksanakan antara lain : Menyusun manajemen risiko PBJ dan melakukan pemantauan serta pengendalian secara berkala.

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2024 yaitu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah, melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan manajemen resiko, melaksanakan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang ditetapkan, dan melakukan proses barang/jasa pemerintah secara *e-purchasing*.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 14 didukung oleh anggaran sebesar Rp 701.719.000 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 457.947.465 atau 65,26%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengelola Barang/ Jasa.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen melalui kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, operasional perkantoran - pengadaan pakaian dinas, pengadaan peralatan perkantoran dalam rangka mendukung PNBP, dan layanan prasarana internal.

Indikator Kinerja (IK) 15 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Prigi

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (reevaluasi aset) (bobot 20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan I 2024 belum dilakukan penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Resntra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya optimalisasi kinerja dan evaluasi terhadap BMN lebih baik. Sedangkan faktor penghambat / kendala yang dihadapi yaitu : 1) Dalam pelaksanaan penghapusan masih belum sesuai dengan SOP karena berhubungan dengan instansi eksternal maupun internal; 2) Belum semua BMN yang rusak berat dilakukan penghapusan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini antara lain : 1) Berkoordinasi secara intensif dalam pengelolaan BMN; 2) Mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak.

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2024 antara lain optimalisasi pemanfaatan aset, mengajukan usulan PSP (penetapan status penggunaan), serta penghapusan / pemusnahan aset.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 15 didukung oleh anggaran sebesar Rp 4.061.622. 000, sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 767.466.155 atau 18,90%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) orang pejabat Pengelola BMN.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - operasional dan pemeliharaan kantor melalui kegiatan pemeliharaan alat pengolah data, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran dan pimpinan, pemeliharaan gedung dan bangunan, serta operasional perkantoran.

Indikator Kinerja (IK) 16 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Capaian Nilai IKPA dilaksanakan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yang dapat diukur dari 3 (tiga) aspek/sisi yaitu :

I. Kualitas Perencanaan Anggaran (bobot 20%) dengan 2 indikator yaitu :

- Revisi DIPA (bobot 10%)
- Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10%)

II. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (bobot 55%) dengan 5 indikator yaitu :

- Penyerapan anggaran (bobot 20%)
- Belanja Kontraktual (bobot 10%)
- Penyelesaian tagihan (bobot 10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
- Dispensasi SPM (bobot 5%)

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan I 2024 belum dilakukan pengukuran. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Resntra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu upaya pencapaian secara maksimal pada 8 (delapan) indikator penilaian IKPA.

Faktor penghambat / kendala pencapaian indikator kinerja ini yaitu dari 8 (delapan) indikator penilaian IKPA masih terdapat 4 (empat) indikator yang mendapatkan capaian kurang maksimal diantaranya dari kualitas perencanaan anggaran indikator Deviasi Halaman III DIPA, kualitas pelaksanaan anggaran indikator penyerapan anggaran, indikator belanja kontraktual dan, indikator Pengelolaan UP dan TUP.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan pada triwulan I 2024 yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan *revolving* UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian *output* dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi *output* sesuai atau diatas target yang ditetapkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 16 didukung oleh anggaran sebesar Rp 33.620.000 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 16.119.000 atau 47,94%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pengelola Keuangan, 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN, serta 1(satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen keuangan - kegiatan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui kegiatan laporan keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja (IK) 17 - Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.

Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dengan bobot penilaian capaian output 43,5%, efisiensi 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perebcanaan 18,2%, dan penyerapan anggaran 9,7%.

Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan I 2024 belum dilakukan pengukuran. Sehingga perbandingan capaian dengan target 2024, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain belum dapat dilakukan.

Faktor pendukung tercapainya IK NKA yaitu dilakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan capaian Indikator Konsistensi , Indikator Efisiensi dan Indikator Nilai Efisiensi. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu dari 8 (delapan) indikator IKPA masih ada 3 (tiga) indikator yang belum memiliki nilai maksimal.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian NKA pada periode selanjutnya yaitu meningkatkan pelaksanaan 8 (delapan) Indikator IKPA.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 17 didukung oleh anggaran sebesar Rp 71.490.000 dan sampai dengan triwulan I 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 10.620.400 atau 14,86%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Pencapaian IK ini didukung oleh 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen keuangan - kegiatan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 10. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Triwulan I 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	83	86	86,76	88,30	90,26	102,22%	-	-

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selalu dilakukan secara periodik. Tujuan pelaksanaan SKM yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Capaian indikator kinerja SKM triwulan I 2024 yaitu 90,26 dengan kategori “Sangat Baik” atau 102,22% dari target triwulan I 2024 dimana target triwulan I 2024 sebesar 88,30.

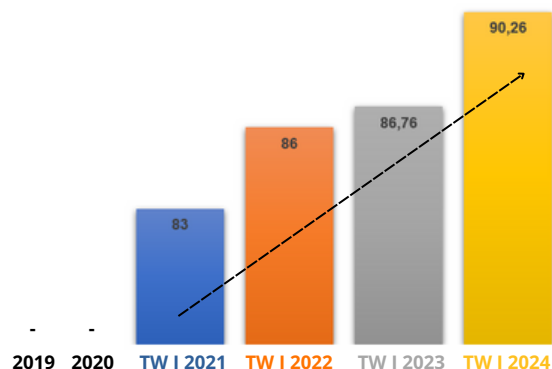
Berdasarkan hasil analisa Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan I 2024, unsur dengan nilai tertinggi yaitu :

- Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas
Petugas pelayanan telah mengikuti Diklat/Bimtek untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tupoksi serta telah mengikuti Bimtek Pelayanan Prima.
- Kemudahan Prosedur
Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP sehingga pengguna jasa mendapatkan pelayanan yang sesuai.

- Persyaratan Pelayanan

Telah dilaksanakan kegiatan publikasi dan sosialisasi terkait persyaratan pelayanan yang dilaksanakan di PPN Prigi

Capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada triwulan I 2024 merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tren nilai naik / meningkat, dimana peningkatannya berkisar antara 3,5 - 7,26 atau 4,03% - 8,75%. Berdasarkan Gambar disamping, dapat dilihat bahwa nilai SKM dari tahun 2021 s.d. tahun 2024 menunjukkan peningkatan terus-menerus. Hal ini sebanding dengan upaya peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.



Gambar 6. Perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 2019 - 2024

Capaian IK Nilai Survei Kepuasan Masyarakat tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi lebih rendah yaitu sebesar 97,75% dimana capaian nilai SKM PPN Palabuhanratu sebesar 92,34.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta perbaikan kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus sehingga kepuasan pengguna jasa meningkat.

Sedangkan faktor penghambat / kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kurangnya pengetahuan pengguna jasa dalam pengisian SKM secara *online*, sehingga sebagian besar pengisian masih menggunakan *form* SKM manual .

Upaya yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian nilai SKM yaitu :

- Sarana Prasarana (U8) - Rencana Layanan Konsultasi melalui kecepatan Respon SIPARI serta menambah publikasi dan sosialisasi SIPARI;
- Kecepatan Respon (U9) - Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Sarana Prasarana - Melaksanakan identifikasi kondisi sarana dan prasarana terkait pelayanan pengadaan air dan penggunaan tanah bangunan.

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2024 antara lain peningkatan fasilitas Pos Pelayanan Terpadu, Reviu Standar Pelayanan dan Tindak Lanjut Hasil SKM, dll.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pencapaian IK 17 didukung oleh anggaran sebesar Rp 7.000.000 dan sampai dengan triwulan I 2024 realisasi anggaran sebesar Rp 2.580.000 atau 36,86%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Pencapaian IK ini didukung oleh 32 (tiga puluh dua) orang petugas pelayanan publik berdasarkan Surat Tugas Nomor 53/PPN.PRG/KP.440/I/2024. Penggunaan aplikasi SISUSAN meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan SKM, baik dari segi SDM maupun waktu.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - layanan organisasi dan tata kelola internal melalui kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di PPN Prigi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 14.760.816.000 sesuai dengan DIPA PPN Prigi TA.2024 dengan nomor DIPA : SP DIPA-032.03.2.427670/2024 tanggal 24 November 2023. Anggaran tersebut terbagi dalam 5 (lima) kegiatan utama sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan I 2024 adalah sebesar Rp 3.751.457.060 atau sebesar 25,41% dari total PAGU Anggaran Tahun 2024.

Tabel 11. Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Triwulan I 2024

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	8.334.000	21,93%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.621.527.000	234.429.893	14,46%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	-	-
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.740.000	-	-
5	Program Dukungan Manajemen Internal	12.201.398.000	1.706.752.402	24,57%
	Jumlah	14.760.816.000	3.751.457.060	25,41%

Target anggaran yang ditetapkan, direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan I 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 12. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan I 2024

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2024 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
1	Nilai PNBP sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Prigi	168.150.000	87.640.000	113,31%	52,12%
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Prigi Meningkatkan	10.000.000	-	114,92%	-
3	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Prigi	586.119.000	69.831.303	111,70%	11,91%
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	805.779.000	67.545.750	120%	8,38%
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	25.000.000	8.334.000	103,75%	33,34%
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di PPN Prigi	13.000.000	-	-	-
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Prigi	13.051.229.000	3.508.693.167	111,11%	26,88%
Jumlah / Persentase		14.760.816.000	3.751.457.060	112,13%	25,41%



BAB IV

PENUTUP

LKJ
TW I 2024

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama triwulan I 2024. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap target tahunan dan capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, target akhir Renstra, dan capaian satker lain yang memiliki karakteristik hampir sama sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Pada triwulan I 2024, Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,13%. Berdasarkan target pada rencana aksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang mendukung 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan memiliki capaian >100%. Pada triwulan I 2024 terdapat 7 (tujuh) indikator dengan pengurusan bersifat triwulan.

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi klausul kontrak perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan perlu ditingkatkan;
- Tingkat efektifitas dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan validasi terhadap input data yang telah dilaksanakan;
- Capaian nilai pengendalian lingkungan bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh beberapa kriteria dan kesesuaian data dukung;
- Nilai tingkat kinerja yang bersifat fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh 27 (dua puluh tujuh) parameter penilaian;
- Awak kapal perikanan belum memiliki sertifikasi awak kapal sesuai jabatan;
- Belum adanya standarisasi di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana kerja pembangunan ZI WBK yang mengacu pada hasil penilaian Menpan RB pada periode sebelumnya
- Tingkat kesadaran pegawai tentang pentingnya IP ASN perlu ditingkatkan;
- Pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara terus menerus sebagai upaya pelayanan prima PPN Prigi.

Hal ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada periode selanjutnya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan.

4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan IV tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan I tahun 2024 yaitu :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta validasi input data pada sistem PIPP; Menyusun jadwal piket untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan validasi terhadap input data yang telah dilaksanakan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian lingkungan;
- Melaksanakan sosialisasi terus menerus terkait dengan pentingnya dokumen dan dokumen perizinan kapal;
- Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pemilik kapal/nakhoda agar tertib dalam pelaporan aktivitas kedatangan kapal;
- Mengajukan penambahan petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan;
- Menyesuaikan kembali tim pembangunan ZI berdasarkan tugas harian sehingga mempermudah pengerjaan kelengkapan dokumen WBK;
- Memberikan pengarahan melalui kegiatan apel pagi dan dialog kinerja lainnya akan pentingnya IP ASN ;
- Memberikan pengarahan melalui kegiatan apel pagi terkait pelayanan publik; Melaksanakan evaluasi petugas pelayanan secara berkala.

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan I 2024, rekomendasi / hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan jasa tanah dan/atau bangunan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta validasi input data pada sistem PIPP; Menyusun jadwal piket untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan validasi terhadap input data yang telah dilaksanakan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian lingkungan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
- Menyusun Rencana Kerja Pembangunan ZI WBK yang telah dikoordinasikan dengan Inspektorat V dan Satker lain;
- Memberikan pengarahan melalui kegiatan apel pagi dan dialog kinerja lainnya akan pentingnya IP ASN ;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala.



LAMPIRAN

**LKJ
TW I 2024**





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ririn Sugihariyati**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi

Ririn Sugihariyati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	27.321
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	45
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	377
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan (Persen)	24,5
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	86
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30		

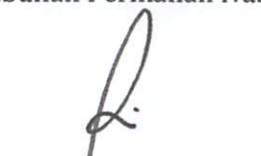
Program : 1. **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan** Rp **2.060.239.000**
2. **Program Dukungan Manajemen** Rp **13.089.439.000**
Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp **15.149.678.000**

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi


Ririn Sugihariyati

SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Prigi

untuk hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan
periode Januari 2024 dengan kategori :

SANGAT BAIK

Jakarta, 19 Februari 2024



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



pipp

SERTIFIKAT

Penghargaan

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Priqi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
bulan Februari 2024 dengan kategori :

SANGAT BAIK



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



pipp



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA :

PPN Prigi

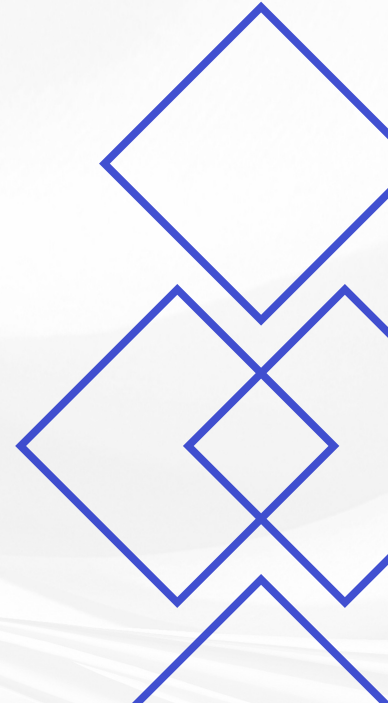
Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
Maret 2024 dengan kategori :

SANGAT BAIK



Direktur
Kepelabuhanan Perikanan

Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



RENCANA AKSI
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Output / Komponen	Satuan Output / Komponen	Target Output Bulanan												
						Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1 Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	Pengadaan sarana penunjang PNB Pasca Produksi	71.000.000	1.207,45	Rp Juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan di Pelabuhan Perikanan dalam rangka Pasca Produksi dan PIT	79.300.000															
		Desiminasi Pelayanan Jasa Sesuai Peraturan	17.850.000															
2 Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	10.000.000	27.321	Ton	-	-	2.193,6	-	-	7.838,2	-	-	15.745,1	-	-	27.321	
3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	Pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan	47.540.000	100	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rapat Monev Pengguna Jasa, Lahan dan Bangunan	33.700.000															
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan	4.000.000															
	4	4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Audit Internal Pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Pelabuhan Perikanan	10.850.000	84	Nilai	-	-	84	-	-	84	-	-	84	-	-	84
			Pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu	48.400.000														
			Bimtek S-CPIB di Pelabuhan Perikanan	14.435.000														
			Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional SPDN di Pelabuhan Perikanan	11.125.000														

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Output / Komponen	Satuan Output / Komponen	Target Output Bulanan												
						Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
7 Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PPN Prigi	12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap	55.000.000	94	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	
	13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Pembayaran gaji dan tunjangan	8.009.398.000	84	Indeks	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	84
			Pembinaan dan Pengembangan SDM	43.000.000														
			Penguatan Integritas dan Substansi Teknis bagi PNS Pengangkatan Tahun 2023	7.000.000														
			Peningkatan kompetensi pegawai	15.380.000														
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, (Laptop, Printer, Scanner, Infokus dan Drone)	247.655.000	80	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
			Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	74.750.000														
			Pakaian Dinas Satpam	15.308.000														
			Peralatan Perkantoran dalam rangka mendukung PNBP Pasca Produksi dan PIT	140.000.000														
			Layanan Prasarana Internal	224.006.000														
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Pemeliharaan Alat Pengolah Data	38.330.000	80	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
			Perawatan Kendaraan Roda 4/6	258.064.000														
			Perawatan Kendaraan Roda 2/3	89.460.000														
			Langganan Daya Dan Jasa	798.000.000														
			Jasa Pos / Giro	2.413.000														
			Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.496.698.000														
Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan			439.250.000															
Operasional Perkantoran			939.407.000															
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap - Laporan Keuangan dan BMN	33.620.000	93,76	Nilai	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	93,76	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Output / Komponen	Satuan Output / Komponen	Target Output Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
7 Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PPN Prigi	17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	22.880.000	86	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
		Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	48.610.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Koordinasi terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7.000.000	88,30	Indeks	-	-	88,30	-	-	88,30	-	-	88,30	-	-	88,30
Jumlah			14.760.816.000														



Tenggalek, Januari 2024
Kepala Pelabuhan

Ririn Sugihariyati
NIP. 19671101 199803 2 002